

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

M. Robbi Kurniawan¹; Taufeni Taufik²; Yesi Herawati³

Universitas Riau, Pekanbaru^{1,2,3}

Email : mhdrobbi22@gmail.com ; taufeni.taufik@lecturer.unri.ac.id ;
yesisherawatiyesi@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh 31 Organisasi Perangkat Daerah sebagai sampel penelitian. Responden berjumlah 93 orang yang terdiri atas bendahara, kepala subbagian keuangan dan aset, serta kepala subbagian umum dan kepegawaian. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Analisis data dilakukan dengan metode *Partial Least Squares (PLS)* menggunakan SmartPLS 4.1.1.5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas informasi keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan keandalan sistem akuntansi merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci : Aksesibilitas Laporan Keuangan; Kualitas Laporan Keuangan; Pengelolaan Keuangan Daerah; Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Sistem Pengendalian Internal

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of financial report quality, financial report accessibility, internal control systems, and local government accounting systems on regional financial management in Kampar Regency. The population in this study was all Regional Apparatus Organizations in Kampar Regency. The sample was determined using a purposive sampling technique, resulting in 31 OPDs as the research sample. The respondents numbered 93 people, consisting of treasurers, heads of the finance and assets subsection, and heads of the general affairs and personnel subsection. The data used were primary data collected through questionnaires. Data analysis was performed using the Partial Least Squares (PLS) method using SmartPLS 4.1.1.5. The results showed that financial report quality, internal control systems, and local government accounting systems significantly influenced regional financial management, while financial report accessibility did not. These findings confirm that improving the quality of financial information, the effectiveness of internal control, and the reliability of accounting systems are important factors in achieving regional financial management.

Keywords : Financial Report Accessibility; Financial Report Quality; Regional Financial Management; Local Government Accounting System; Internal Control System

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi untuk menjamin penggunaan sumber daya publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah semestinya dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, serta berpedoman pada prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas

sebagaimana diamanatkan dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Ruang lingkupnya mencakup seluruh siklus keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Apabila setiap tahapan tersebut berjalan secara terintegrasi dan konsisten, maka pengelolaan keuangan daerah akan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Kampar yang tercatat memiliki skor IPKD sebesar 71,09 dengan predikat “Perlu Perbaikan”. Skor ini berada di bawah rata-rata IPKD kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mencapai angka 71,34. Dibandingkan dengan pemerintah kabupaten lainnya di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar berada pada peringkat keenam terbawah dengan skor IPKD terendah (Kemendagri, 2023).

Indikasi belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kampar semakin diperkuat oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023. Meskipun Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp2,83 triliun dengan realisasi Rp2,62 triliun (92,65%), ditemukan kesalahan penganggaran pada 37 SKPD untuk Belanja Barang dan Jasa serta lima SKPD untuk Belanja Modal, sehingga realisasi sebesar Rp58,93 miliar dan Rp5,59 miliar tidak mencerminkan kondisi yang senyatanya dan berpotensi membebani keuangan daerah. Selain itu, terdapat kekurangan penganggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp15,88 miliar dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp219,35 juta, yang menghambat pendanaan pemerintahan desa. Pada aspek belanja pegawai, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp193,52 juta, potensi kelebihan pembayaran Rp273,99 juta, serta pelampauan pagu anggaran Rp192,62 juta, yang menunjukkan lemahnya pengendalian internal. Permasalahan juga terjadi pada Belanja Barang dan Jasa dengan kelebihan pembayaran mencapai Rp1,48 miliar, serta pembebanan tidak semestinya seperti honorarium Rp2,31 miliar, BBM *lumpsum* Rp522,49 juta, BOS Rp445,13 juta, dan kelebihan setor PPN Rp40,96 juta. Di sisi lain, pemerintah daerah belum mengoptimalkan potensi penerimaan dari denda keterlambatan sebesar Rp298,78 juta dan denda pajak Rp111,94 juta. Kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang tidak hanya menimbulkan ketidaksesuaian administrasi, tetapi juga berdampak pada inefisiensi dan potensi kerugian keuangan daerah (BPK, 2023).

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah sendiri telah banyak dilakukan, Namun temuan dari beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan Defana & Rahayu, (2023) di BPKAD Kabupaten Bandung

Barat membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Fintari et al., (2023) yang melakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi Aceh. Namun, temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Al Fahmi et al., (2023) yang menemukan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya penelitian Priscilla et al., (2022) di Kabupaten Siak dan Al Fahmi et al., (2023) di Kabupaten Aceh Utara menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, Shadrina & Hidajat, (2023) menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tuban.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga terlihat pada penelitian Izzah et al., (2021) serta Yuanita & Suropto, (2022) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun, Defana & Rahayu, (2023) justru menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Demikian pula, meskipun Priscilla et al., (2022) menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, Rahayu et al., (2024) menemukan hasil sebaliknya. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menempatkan pengelolaan keuangan daerah pada aspek akuntabilitas dan pertanggungjawaban, sehingga belum sepenuhnya mengkaji pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu sistem yang mencakup seluruh tahapan siklus keuangan.

Hasil berbagai penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi yang mengindikasikan adanya kesenjangan empiris dalam literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel belum sepenuhnya konklusif, sehingga masih terdapat kesenjangan empiris dalam literatur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai konteks yang berbeda dari penelitian terdahulu, dengan tujuan memberikan bukti empiris baru terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu kebaruan penelitian ini adalah melalui pendekatan pengukuran pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya berfokus pada aspek akuntabilitas, tetapi juga mencakup seluruh tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya terkait

pengelolaan keuangan daerah, melalui penyediaan bukti empiris pada konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, serta dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal sebagai pemberi mandat dan agen sebagai penerima mandat untuk menjalankan tugas tertentu. Dalam hubungan tersebut, kedua pihak diasumsikan bertindak rasional dan berorientasi pada kepentingan pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Ghozali, 2020:86). Permasalahan utama dalam teori ini adalah asimetri informasi, yaitu kondisi ketika agen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan prinsipal, yang dapat mendorong timbulnya perilaku oportunistik dan moral hazard (Ghozali, 2020:8; Muuna et al., 2023). Asimetri informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai (Muuna et al., 2023). Untuk meminimalkan konflik tersebut, prinsipal dapat membentuk struktur tata kelola yang memungkinkan pengawasan langsung serta merancang kontrak berbasis kinerja guna menyelaraskan kepentingan agen dengan tujuan organisasi (Ghozali, 2020:87).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen fundamental dalam manajemen anggaran publik yang mencakup seluruh tahapan dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari perencanaan hingga evaluasi pemanfaatan anggaran (Moene & Suwanda, 2019:24). Selain sebagai proses administratif, pengelolaan keuangan daerah juga memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sehingga berperan sebagai instrumen strategis dalam mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Halim & Iqbal, 2019:33).

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah serangkaian ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam penyajian informasi keuangan pemerintah (*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*, Indonesia). Temuan Defana & Rahayu, (2023) serta (Fintari et al., 2023) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyediaan informasi yang relevan dan andal. Namun demikian, Al Fahmi et al., (2023) mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan secara formal tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan keuangan secara nyata.

Ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi anggaran mengindikasikan bahwa laporan keuangan berpotensi hanya berfungsi sebagai alat legitimasi administratif, bukan sebagai instrumen evaluasi yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya disparitas antara kualitas normatif dan implementasi praktis dalam pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan dalam sektor publik merujuk pada kemudahan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh, membaca, memahami, serta mengevaluasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010:396). Penelitian Priscilla et al., (2022) dan (Al Fahmi et al., 2023) menunjukkan bahwa aksesibilitas berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Namun, Shadrina & Hidajat, (2023) menemukan bahwa aksesibilitas tidak memberikan pengaruh signifikan, yang disebabkan oleh keterbatasan dalam distribusi informasi dan rendahnya efektivitas media komunikasi pemerintah. Kontradiksi ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh kualitas penyajian, saluran distribusi, serta kapasitas pengguna dalam memanfaatkan informasi tersebut.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah “proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” (*PP No. 60 Tahun, 2008*, Indonesia). Penelitian Izzah et al., (2021) dan (Priscilla et al., 2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pencegahan kesalahan dan penguatan prosedur kerja. Namun, Defana & Rahayu, (2023) menemukan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan akibat lemahnya implementasi, khususnya pada aspek komunikasi, informasi, dan pemisahan tugas. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi sangat bergantung pada konsistensi dan kualitas penerapannya dalam praktik organisasi.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu kesatuan yang terstruktur dan terintegrasi, terdiri dari prosedur, pelaksana, perangkat, serta unsur-unsur pendukung lainnya, yang dirancang untuk menjalankan fungsi akuntansi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah, pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik mulai dari pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan ini akan secara langsung membantu proses

pengelolaan keuangan daerah (Azlina et al., 2022:21). Penelitian yang dilakukan Priscilla et al., (2022) menemukan bahwa sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah karena mendukung penyajian informasi yang sistematis dan tepat waktu. Sebaliknya, Rahayu et al., (2024) menunjukkan bahwa sistem akuntansi tidak memberikan pengaruh signifikan karena cenderung dimanfaatkan sebatas untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai alat analitis dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara fungsi ideal sistem akuntansi dan realitas penggunaannya di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa meskipun terdapat kesamaan pandangan mengenai pentingnya keempat variabel dalam pengelolaan keuangan daerah, hasil empiris yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara empiris pengaruh kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam satu model terpadu berbasis *agency theory*.

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Melalui laporan keuangan yang disusun secara andal, relevan, dan sesuai dengan standar yang berlaku, para pemangku kepentingan dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah secara objektif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2018:200). Defana & Rahayu, (2023) menyatakan laporan keuangan yang disusun secara berkualitas, ditandai dengan penyajian yang tepat waktu, lengkap, andal, serta dapat dibandingkan, menyediakan informasi yang relevan bagi pemerintah daerah sehingga membantu dalam mengevaluasi dan merencanakan pengelolaan keuangan. Beberapa penelitian lima tahun terakhir juga secara empiris telah membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah (Defana & Rahayu, 2023; Fintari et al., 2023; Paramayana et al., 2022; Rahayu et al., 2024; Shadrina & Hidajat, 2023; Simanjorang & Arifian, 2023; Somad et al., 2023).

H₁: Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Al Fahmi et al., (2023) menyatakan dengan mengutamakan aksesibilitas laporan keuangan, pemerintah daerah dapat mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan publik serta pemahaman masyarakat terhadap praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Secara empiris beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa penyediaan akses laporan keuangan yang mudah dan terbuka menjadi instrumen strategis dalam

memperkuat pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab (Al Fahmi et al., 2023; Defana & Rahayu, 2023; Fintari et al., 2023; Paramayana et al., 2022; Priscilla et al., 2022; Rahayu et al., 2024; Simanjourang & Arifian, 2023; Antika et al., 2020).

H₂: Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat, proses pengelolaan keuangan daerah dimana setiap transaksi dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim & Iqbal, 2019:257). Izzah et al., (2021) menyatakan sistem pengendalian internal berperan penting dalam memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan proses pengelolaan keuangan, sehingga para pemangku kepentingan percaya atas seluruh proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan pengendalian intern yang baik diharapkan mampu mencegah maupun mendeteksi kesalahan dalam proses akuntansi, agar seluruh tahapan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, tepat, dan tertib. Beberapa penelitian telah dilakukan dan membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah (Fintari et al., 2023; Izzah et al., 2021; Priscilla et al., 2022; Sarah et al., 2020; Antika et al., 2020).

H₃: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Priscilla et al., (2022), menyatakan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan elemen mendasar yang wajib dipahami dan dilaksanakan secara konsisten dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik. Pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan menuntut adanya pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yang hanya dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel. Secara empiris beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Herlina et al., 2021; Priscilla et al., 2022; Antika et al., 2020).

H₄: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Populasi penelitian terdiri dari 54 OPD yang mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 6 Badan, 22 Dinas, dan 23 Kecamatan, sedangkan sampel diambil

menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 31 OPD yang dianggap mewakili populasi berdasarkan skala dan kompleksitas pengelolaan keuangan, dengan responden berjumlah 93 orang yang terdiri dari Bendahara, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber primer yang diperoleh melalui kuesioner, di mana pertanyaan disusun menggunakan skala *likert* untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap variabel penelitian. Variabel diukur menggunakan indikator terstruktur agar dapat ditarik kesimpulannya. Adapun definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Squares (PLS)* dengan bantuan program SmartPLS versi 4.1.1.5, yaitu salah satu pendekatan dalam *Structural Equation Modeling (SEM)* yang berfokus pada pengujian hubungan struktural antar variabel laten yang diukur melalui indikator-indikator dengan tujuan memaksimalkan kemampuan prediksi model serta menjelaskan varians variabel terikat (Setiabudhi et al., 2025:17). Teknik analisis *PLS* dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu pengujian model pengukuran (*outer model*) untuk menilai hubungan antara indikator dengan variabel latennya, serta pengujian model struktural (*inner model*) untuk menganalisis hubungan antar variabel laten (Sihombing et al., 2024:2-5).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Gambaran umum responden menggambarkan karakteristik serta sebaran jawaban yang merefleksikan kondisi, karakter, dan ciri khas responden, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai keadaan responden. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui pendistribusian kuesioner pada periode September hingga Oktober. Total kuesioner yang disalurkan berjumlah 93 eksemplar, dan seluruh kuesioner tersebut berhasil dikembalikan oleh seluruh OPD dalam keadaan terisi lengkap.

Berdasarkan tabel 2, mayoritas responden OPD Kabupaten Kampar adalah perempuan sebesar 54,84%. Latar belakang pendidikan terbanyak berasal dari bidang akuntansi, ekonomi, atau manajemen dengan jumlah 49 orang (52,69%). Pengalaman kerja responden juga didominasi oleh kelompok dengan masa kerja 11–20 tahun sebanyak 54 orang (58,06%). Selain itu, tingkat pendidikan mayoritas adalah Sarjana (S1) dengan jumlah 57 orang (61,29%), yang artinya sebagian besar pegawai pada OPD telah memiliki latar belakang akademik cukup memadai untuk menjalankan tugas terutama di bidang keuangan.

Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan secara objektif, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi dari mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2024:147).

Berdasarkan tabel 3, hasil analisis statistik deskriptif terhadap 93 responden menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,485 serta standar deviasi sebesar 0,559. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian sangat setuju terhadap pernyataan yang diajukan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa laporan keuangan dinilai telah memenuhi karakteristik kualitatif. Variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,421 serta standar deviasi sebesar 0,944. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas laporan keuangan berada pada kategori cukup baik. Namun, besarnya standar deviasi mengindikasikan adanya variasi persepsi di antara responden. Selanjutnya, variabel sistem pengendalian internal menunjukkan nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,335 serta standar deviasi sebesar 0,599. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa persepsi responden cenderung konsisten dalam menilai bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif. Pada variabel sistem akuntansi pemerintah daerah, diperoleh nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,403 serta standar deviasi sebesar 0,578. Nilai rata-rata yang tinggi dan standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dinilai sangat baik serta memiliki tingkat persepsi responden yang cukup homogen. Terakhir, variabel pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 5, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 4,410 serta standar deviasi sebesar 0,622. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan pada OPD secara umum dinilai sangat baik, meskipun masih terdapat variasi persepsi yang relatif kecil di antara responden.

Selanjutnya adalah melakukan uji model pengukuran (*Outer Model*). *Outer model* dimanfaatkan untuk menguji hubungan indikator dengan variabel latennya. Evaluasi *outer model* dilakukan dengan mengukur validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas dilakukan untuk memastikan apakah pernyataan yang digunakan didalam kuesioner sudah benar-benar mengukur variabel yang diwakilinya. Dalam penelitian ini, uji validitas diukur melalui *uji outer loading* dan nilai *AVE*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi kriteria validitas apabila memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70, sementara nilai sebesar 0,60 masih dianggap dapat diterima, adapun nilai *AVE* dinyatakan memenuhi syarat validitas apabila melebihi 0,50 (Sihombing *et al.*, 2024,11-12). Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketetapan instrumen dalam mengukur konstruk (Sugiyono, 2024,121). Mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Sihombing *et al.*, (2024,12),

menyarakan suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* > 0,70.

Berdasarkan tabel 4, seluruh pernyataan yang digunakan dalam variabel penelitian memiliki nilai *loading factor* di atas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan tersebut telah memenuhi ketentuan *convergent validity*. Kemudian, nilai *Average Variance Extracted (AVE)* pada masing-masing variabel juga menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,50. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas dan dinilai layak untuk merepresentasikan serta mengukur setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* masing-masing berada di atas 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas. Dengan demikian alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini mampu menghasilkan data yang konsisten apabila dilakukan pengujian secara berulang pada subjek dan kondisi yang serupa.

Setelah alat ukur dinyatakan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas selanjutnya adalah melakukan uji model struktural. pengujian model struktural merupakan tahapan analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat antar variabel laten, yaitu variabel yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Pada penelitian ini, penilaian model struktural dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah ukuran kelayakan model, meliputi uji koefisien determinasi, uji model *fit*, serta pengujian hipotesis dengan melihat koefisien jalur (*path coefficients*).

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menggambarkan kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi yang terjadi pada variabel dependen.

Dari tabel 5, nilai *Adjusted R-Square* tercatat sebesar 0,582, yang berarti bahwa 58,2% pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, serta sistem akuntansi pemerintah daerah. Sisanya, sebesar 41,8%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan nilai *Adjusted R-Square* berada di antara 33% hingga 67%, pengaruh variabel tersebut dikategorikan pada tingkat moderat. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi pemerintah daerah dianggap sebagai faktor penting, meskipun belum menjadi satu-satunya penentu dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Pengujian model fit atau kesesuaian model dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *SRMR* dan *NFI*.

Berdasarkan tabel 6, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *standardised root mean square residual* sebesar 0,084, yang berarti berada di bawah batas 0,10, sehingga model

berdasarkan kriteria *SRMR* dapat dinyatakan memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Selanjutnya, nilai *normed fit index* yang diperoleh sebesar 0,584 mengindikasikan bahwa nilai tersebut mendekati angka 1, sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan layak dan memiliki kecocokan yang memadai.

Selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis untuk mengonfirmasi kebenaran asumsi penelitian yang telah dirumuskan. Proses pengujian tersebut dilaksanakan melalui analisis jalur (*path analysis*) terhadap model yang telah dikembangkan. Dalam pendekatan *PLS*, keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi yang ditunjukkan oleh nilai *p-value* serta nilai *t*-tabel. Batas signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 5%, dengan nilai *t*-tabel sebesar 1,96 sebagai acuan dalam pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis (Paramita, 2015,43). Dengan demikian, hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai *p-value* <0,05 dan nilai *t*-statistik >1,96.

Berdasarkan gambar 1 dan tabel 7, maka hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) yaitu kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien 0,251 dengan *p-value* 0,005 (<0,05) dan nilai *t*-statistik 2,803 (>1,96). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **H_1 diterima**. Berdasarkan temuan di lapangan, mayoritas responden menilai bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar telah disusun dengan kualitas yang baik. Laporan keuangan dinilai relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami karena menyajikan informasi penting untuk pengambilan keputusan, evaluasi anggaran, serta disusun secara tepat waktu dan konsisten. Kondisi ini mendukung tersedianya informasi keuangan yang akurat sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang andal, relevan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang andal menjadi dasar yang akurat bagi pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran dan menetapkan prioritas program. Informasi yang relevan membantu pengambil keputusan dalam menilai kondisi fiskal dan kemampuan pendanaan daerah. Selain itu, laporan keuangan yang mudah dipahami mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran karena memberikan pemahaman yang sama bagi pihak terkait. Kemampuan laporan keuangan untuk dibandingkan antarperiode maupun antarentitas juga memudahkan pemerintah daerah melakukan pengendalian dan perbaikan terhadap penyimpangan anggaran.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Defana & Rahayu, (2023) yang menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki peranan strategis dalam

meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan yang disusun secara berkualitas, tercermin dari penyajian yang tepat waktu, lengkap, dan andal, mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) yaitu aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien 0,079 dengan *p-value* 0,222 ($>0,05$) dan nilai *t-statistik* 1,222 ($<1,96$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_2 **ditolak**. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat responden yang menyatakan tidak setuju dan ragu-ragu terhadap pernyataan bahwa informasi keuangan OPD dapat diakses melalui media terbuka seperti papan pengumuman, surat kabar, atau website resmi. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi keuangan OPD di Kabupaten Kampar melalui media yang mudah diakses publik masih belum optimal. Selain itu, pada pernyataan bahwa semua pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses laporan keuangan juga banyak mendapat jawaban tidak setuju dan ragu-ragu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses terhadap laporan keuangan masih terbatas dan cenderung lebih mudah diakses oleh pihak internal pemerintah dibandingkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan belum diterapkan secara optimal sehingga belum mampu memengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Agar aksesibilitas dapat memberikan dampak, diperlukan dukungan media informasi yang memadai, komitmen pemerintah daerah dalam membuka akses secara konsisten, serta kesadaran bahwa keterbukaan informasi keuangan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, kemudahan akses saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemahaman dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Oleh karena itu, meskipun laporan keuangan telah tersedia, aksesibilitas tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah apabila informasi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shadrina & Hidajat (2023), yang membuktikan tidak adanya pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa akses laporan keuangan masih terhambat dan informasi yang ditampilkan pemerintah daerah belum lengkap, jarang diperbarui, atau sulit ditemukan oleh masyarakat. Media massa dan *website* resmi pun belum banyak menyediakan laporan keuangan secara terbuka, akibatnya, aksesibilitas laporan keuangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien 0,232 dengan *p-value* 0,016 ($<0,05$) dan nilai *t-statistik* 2,420 ($>1,96$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_3

diterima. Berdasarkan temuan di lapangan, organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kampar telah menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya aturan kode etik, keteladanan pimpinan, penetapan batas risiko, serta penerapan pengendalian untuk meminimalkan kesalahan dan penyimpangan. Setiap transaksi keuangan dilakukan melalui persetujuan pejabat berwenang dengan pembagian tugas yang jelas dan didukung sistem informasi. Selain itu, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan mendadak dan tindak lanjut atas rekomendasi audit BPK, sehingga mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai peraturan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai berperan penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada setiap tahapan. Lingkungan pengendalian yang baik, seperti keteladanan pimpinan, struktur organisasi yang jelas, serta pembagian tugas yang tegas, dapat menciptakan budaya kerja yang berintegritas dan mendukung proses perencanaan serta pelaksanaan keuangan daerah. Penilaian risiko membantu pemerintah daerah mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kesalahan penganggaran maupun penyimpangan kegiatan. Selain itu, aktivitas pengendalian seperti otorisasi, pemisahan fungsi, dan verifikasi memastikan setiap transaksi keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan dan dicatat dengan benar. Sistem informasi dan komunikasi yang baik juga mendukung ketersediaan data keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Sementara itu, pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan pemerintah daerah mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian internal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Yuanita & Suropto, (2022) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan secara memadai mampu meminimalkan kekeliruan sehingga memberikan keyakinan atas keandalan proses pengelolaan keuangan, Hal ini meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui mekanisme pengendalian yang baik, potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam proses akuntansi dapat dicegah dan dideteksi sejak dini.

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien 0,359 dengan p -value 0,000 ($<0,05$) dan nilai t -statistik 4,122 ($>1,96$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **H_4 diterima.** Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat dijelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kampar telah menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan baik. Hal ini tercermin dari pencatatan setiap transaksi keuangan yang dilakukan secara kronologis dan didukung oleh bukti yang memadai, disertai dengan proses analisis dan klasifikasi transaksi sesuai ketentuan yang berlaku, serta penyusunan laporan keuangan yang

dilakukan secara konsisten dan periodik pada setiap akhir periode akuntansi. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik tersebut sehingga membantu aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kampar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Proses pencatatan yang dilakukan secara tertib dan didukung oleh bukti transaksi yang memadai menghasilkan data keuangan yang akurat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab. Selanjutnya, pengklasifikasian transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku membantu pemerintah daerah dalam mengelompokkan penggunaan anggaran secara tepat, sehingga memudahkan proses penatausahaan dan pengendalian keuangan daerah. Selain itu, proses pelaporan yang disusun secara periodik, konsisten, dan tepat waktu memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau realisasi anggaran serta mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Priscilla et al., (2022) yang menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan unsur fundamental dalam organisasi sektor publik untuk mewujudkan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap OPD wajib menerapkan sistem akuntansi sesuai standar yang berlaku pada seluruh siklus pengelolaan keuangan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi pemerintah daerah, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan. Peningkatan kualitas laporan keuangan serta penerapan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi pemerintah yang efektif terbukti mampu memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Sebaliknya, aksesibilitas laporan keuangan belum berdampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kampar.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan empat variabel independen yang hanya mampu menjelaskan 58,2% variasi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, atau pemanfaatan teknologi informasi agar memperoleh gambaran baru mengenai pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penggunaan kuesioner membuat hasil penelitian bergantung pada persepsi dan kejujuran responden. Penelitian

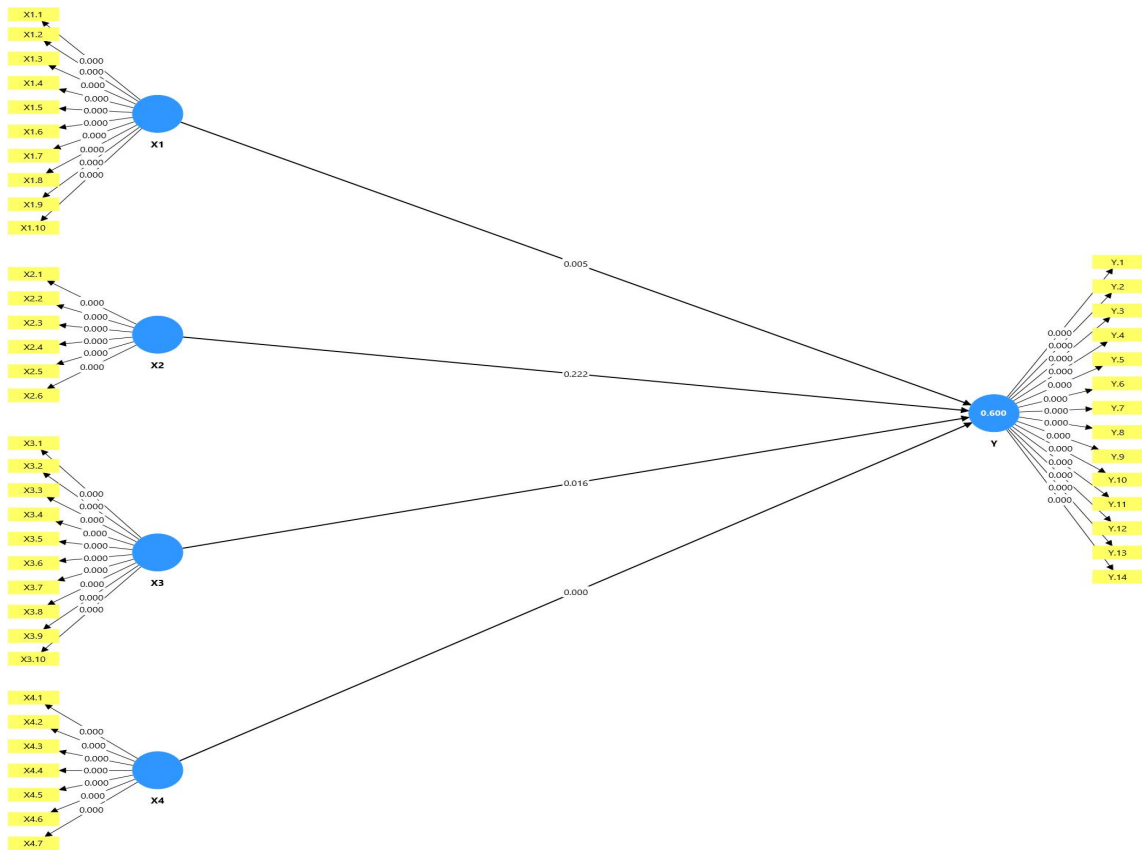
selanjutnya dianjurkan melengkapi metode pengumpulan data dengan wawancara atau observasi agar memperoleh informasi yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fahmi, M. L., Zulkarnaini, Z., Fauzan, F., Rahman, B., Maulidin, M., & Athailah, A. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 620–634. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.459>
- Azlina, N., Basri, Mutia, Y., & Desmiyawati. (2022). *Akuntansi Pemerintah* (1st ed.). Taman Karya Anggota IKAPI Putri Alam Permai C/12 Pekanbaru.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (1st ed.). Erlangga. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/201158/akuntansi-sektor-publik-suatu-pengantar>
- Defana, F. A., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021). *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 21–30. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Fintari, I. H., Islahuddin, I., & Dedi Priantana, R. (2023). The Influence of Government Internal Control System, Financial Report Presentation, and Accessibility on Financial Management Accountability. *International Journal of Social Health*, 2(8), 525–533. <https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i8.85>
- Ghozali, I. (2020). *25 Teori Besar ilmu manajemen, akuntansi dan bisnis*. Yoga Pratama.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah (Ke Empat)*. UPP STIM YKPN.
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4, 419–433.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Indonesia, B. P. K. R. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Izzah, D., Taufik, T., & Oktari, V. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa-Desa di Kabupaten Kampar. *CURRENT Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 12–28. <https://current.ejournal.unri.ac.id>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-378 Tahun 2023 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022, (2023).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Moene, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/>
- Muuna, A. N., Prastikawati, E., Laili, A. N., Sari, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Asimetri Informasi Dan Teori Keagentan Pada Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–8.
- Paramayana, A. N., Dewi, R. R., & Astungkara, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap

- Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4108–4112. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1070>
- Paramita, D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Program Studi Akuntansi STIE Widya Gama Lumajang.
- Priscilla, D., Taufik, T., & Riau, U. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 180–190. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v6i2.1317>
- Rahayu, D., Yanto, Y., Ulza, E., & Arvian, R. (2024). The Influence of Internal Control Systems, Regional Financial Accounting Systems, Financial Report Presence, And Accessibility of Financial Reports on The Accountability of Financial Management In Tangerang Selatan Government. *Proceedings of the 1st International Conference on Economics and Business*. <https://doi.org/10.4108/eai.2-8-2023.2341462>
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). 3 1,2&3. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330–342. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Setiabudhi, H., Suwono, Setiawan, A., & Karim, S. (2025). *Analisis Data Kuantitatif dengan SmartPLS 4* (I. P. H. H. Duari (ed.)). Borneo Novelty Publishing.
- Shadrina, N. S., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 459. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.873>
- Sihombing, P. R., Arsani, A. M., Oktaviani, M., Nugraheni, R., Wijaya, L., & Muhammad, I. (2024). *Aplikasi SmartPLS 4.0 Untuk Statisi Pemula* (I. Marzuki (ed.); 1st ed.). Minhaj Pustaka.
- Simanjanong, M., & Arifian, A. (2023). *The effect of quality of presentation of financial statements and accessibility of financial statements on financial management accountability: case studies in regional apparatus organizations in the City of Bandung in 2023*. 14(2), 573–583. <https://gemawiralodra.unwir.ac.id/index.php/gemawiralodra/issue/view/22>
- Somad, F. H., Naz'aina, N., Khaddafi, M., & Razif, R. (2023). Pengaruh Penyajian, Aksebilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(2), 202. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11866>
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA.
- Yuanita, E., & Suropto, B. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Nonlaba. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 454–471. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.18674>
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Pengujian Hipotesis dengan *Bootstrapping*
Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.5, 2025

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020).	Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan (Defana & Rahayu, 2023).
Kualitas Laporan Keuangan (X1)	Serangkaian ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam penyajian informasi keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).	Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami (Defana & Rahayu, 2023)
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	Kemampuan suatu daerah untuk menyediakan suatu kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan memperoleh informasi laporan keuangan yang bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020).	Keterbukaan, Kemudahan Akses, Ketersediaan Informasi (Antika et al., 2020).
Sistem Pengendalian Internal (X3)	Suatu proses yang terintegrasi dalam tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan

Variabel	Definisi	Indikator
	seluruh karyawan dengan tujuan memberikan keyakinan terhadap pencapaian tujuan organisasi (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).	Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Internal (Antika et al., 2020).
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4)	Suatu kesatuan yang terstruktur dan terintegrasi, terdiri dari prosedur, pelaksana, perangkat, serta unsur-unsur pendukung lainnya, yang dirancang untuk menjalankan fungsi akuntansi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah (Azlina et al., 2022:21).	Tahap Pencatatan, Tahap Pengihtisaran, Tahap Pelaporan (Priscilla et al., 2022).

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kriteria	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	42	45,16%
	Perempuan	51	54,84%
Latar Belakang Pendidikan	Fakultas Ekonomi	49	52,69%
	Selain Fakultas Ekonomi	25	26,88%
	Tidak Menyertakan Latar Belakang	19	20,43%
Pengalaman Bekerja	1-10 tahun	10	10,75%
	11-20 tahun	54	58,06%
	21-30 tahun	29	31,18%
Pendidikan Terakhir	SLTA/ SMA	19	20,43%
	S1	57	61,29%
	S2	17	18,28%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Kualitas Laporan Keuangan (X1)	93	3,000	5,000	4,485	0,559
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	93	1,000	5,000	3,421	0,944
Sistem Pengendalian Internal (X3)	93	2,000	5,000	4,335	0,599
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4)	93	3,000	5,000	4,403	0,578
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	93	1,000	5,000	4,410	0,622

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.5, 2025

Tabel 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	Outer Loading	AVE	Cronbach's alpha	Composite reliability
Kualitas Laporan Keuangan (X1)	X1.1-X1.10	0.735-0.841	0.610	0.929	0.940
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	X2.1-X2.6	0.707-0.852	0.641	0.898	0.914
Sistem Pengendalian Internal (X3)	X3.1-X3.10	0.658-0.827	0.541	0.906	0.921
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4)	X4.1-X4.7	0.797-0.870	0.702	0.929	0.943
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Y1-Y14	0.676-0.851	0.631	0.955	0.960

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0.600	0.582

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.5, 2025

Tabel 6. Hasil Uji Model *Fit*

	Model Estimasi	Kriteria	Keterangan
<i>SRMR</i>	0.084	< 0,10	Sudah <i>Fit</i>
<i>NFI</i>	0.584	0-1	Sudah <i>Fit</i>

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.5, 2025

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	<i>Original Sampel (O)</i>	<i>Std. Dev.(STDEV)</i>	<i>T statistic (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>	Keterangan
H1	0.251	0.090	2.803	0.005	Diterima
H2	0.079	0.065	1.222	0.222	Ditolak
H3	0.232	0.096	2.420	0.016	Diterima
H4	0.359	0.087	4.122	0.000	Diterima

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.1.1.5, 2025